

ABSTRAK

Nurazisyam. 105251104721. 2025. Judul Skripsi: Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai UU Perlindungan Konsumen Pada Pembiayaan Skema Jaminan di Kabupaten Pangkep. Dibimbing Oleh **Hasanuddin** dan **Abdul Malik**.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam praktik pembiayaan skema jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami hak-haknya sebagai konsumen serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pemahaman tersebut. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan literasi hukum konsumen di sektor jasa keuangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terbuka, observasi langsung, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari masyarakat Kabupaten Pangkep yang pernah terlibat dalam pembiayaan berskema jaminan, serta data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan terkait. Data dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) pernah terlibat dalam pembiayaan berbasis jaminan, dengan menggunakan BPKB kendaraan, sertifikat tanah, maupun sertifikat rumah. Namun, mayoritas responden tidak mengetahui isi bahkan keberadaan UU No. 8 Tahun 1999. Dari 18 responden, hanya 2 orang yang memahami substansi undang-undang, 10 orang sekadar pernah mendengar, dan 6 orang sama sekali tidak mengetahuinya. Rendahnya literasi hukum, kurangnya penjelasan dari pihak bank, serta minimnya sosialisasi dari instansi terkait menjadi kendala dominan. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah dan rentan dirugikan dalam praktik pembiayaan. Temuan ini menegaskan perlunya edukasi hukum yang terstruktur serta keterlibatan aktif perbankan dan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Perlindungan Konsumen, Pembiayaan Skema Jaminan, Perbankan

ABSTRACT

Nurazisyam. 105251104721. 2025. Thesis Title: Analysis of Public Understanding of the Consumer Protection Law in Collateral-Based Financing Schemes in Banking Institutions in Pangkep Regency. Supervised by **Hasanuddin** and **Abdul Malik**.

The low level of public understanding regarding Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly in the practice of collateral-based financing, is the central issue of this study. The purpose of this research is to examine the extent to which the public understands their rights as consumers and to identify the obstacles that hinder such understanding. This study also aims to provide both theoretical and practical contributions to improving consumer legal literacy in the financial services sector.

This research employs a field study with a qualitative approach. Data were collected through open-ended questionnaires, direct observation, and documentation. The sources of data consist of primary data obtained from residents of Pangkep Regency who have engaged in collateral-based financing, as well as secondary data from various literature and relevant regulations. The data were analyzed thematically using normative and empirical approaches.

The findings reveal that all respondents (100%) had been involved in collateral-based financing, using vehicle ownership documents (BPKB), land certificates, or house certificates as collateral. However, the majority of respondents were not aware of the contents or even the existence of Law No. 8 of 1999. Out of 18 respondents, only 2 understood the substance of the law, 10 had merely heard of it, and 6 had no knowledge of it at all. Low legal literacy, lack of explanation from banks, and limited outreach from relevant institutions were identified as the dominant obstacles. This condition places consumers in a weak bargaining position and makes them vulnerable to unfair practices in financing agreements. These findings emphasize the urgent need for structured legal education and active involvement of banks and local government in strengthening consumer protection.

Keywords: Public Understanding, Consumer Protection, Collateral-Based Financing, Banking